BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sistem

Menurut Mulyadi, Sistem merupakan sekelompok unsur yang sangat berhubungan erat satu sama lain. Dimana sistem berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.[1] Sistem merupakan serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terikat satu sama lain dalam mencapai tujuan.[2]

2. Informasi

Informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses dalam pengambilan keputusan.[3] Informasi dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan dapat dikatakan bernilai bila memberikan manfaat lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya.[4]

3. Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu jaringan komputer yang mana digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Sistem informasi adalah sekumpulan dari perangkat lunak yang digunakan sesuai prosedur dan aturan yang diintegrasi untuk mengolah data menjadi

---

[1] Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat,2018), hal.2

[2] Marshall B Romney, dan Paul John Steinbart,*Sistem Informasi Akuntansi*,(Jakarta : Salemba Empat,2014), hal.3

[3] Ibid., hal.4

[4] Kusrini, dan Andri Koniyo,*Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic&SQL Server*, (Yogyakarta:CV.Andi Offset,2007), hal.7

informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan output yang baik.[5]

4. Komponen sistem informasi

Komponen sistem informasi terbagi dalam beberapa macam diantaranya :

a. Perangkat keras (*hardware*), merupakan peraangkat yang mencakup berbagai perangkat fisik diantaranya komputer dan printer.
b. Perangkat lunak (*software*), merupakan sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras dapat memproses data.
c. Prosedur, merupakan sekumpulan aturan yang dapat dipakai dalam mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
d. Orang, merupakan semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.
e. Basis data (*database*), merupakan sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan data.
f. Jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber dapat dipakai secara bersama-sama atau dapat diakses oleh sejumlah pemakai.[6]

5. Pengelolaan Keuangan

Perencanaan anggaran merupakan salah satu cara bagi organisasi dalam menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Proses perencanaan

[5] Ibid., hal.8-9
[6] Ibid., hal.9

dalam pemerintah meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Setelah Anggaran Pendapatan Belanja Deerah (APBD) ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kemudian melakukan proses Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan perencanaan pembagunan daerah yang digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan pembagunan daerah. Dalam pembentukan Kebijakan Umum Anggaran tidak terlepas dari Prioritas dan Platfron Anggaran Sementara (PPAS).[7]

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi azas umum pengelolaan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan Perubahan APBD, penatausahan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, Pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, pengelolaan utang milik daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian atas pengelolaan daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah.[8]

---

[7] Dudi Iskandar,dkk,*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Politik Penganggaran, dengan Transparasi Publik sebagai variabel moderating terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara,(Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol.6 2013),hal.97*

[8] Diana Nova Lintong,dkk,*Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah KOTAMOBAGU*,(Manado:Universitas Sam Ratulangi, Vol.06 No.01 2017), hal.121.

6. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mencatat segala transaksi berupa mencatat, merangkum, mengadministrasikan serta memproses data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang diinformasikan kepada masyarakat dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.[9]

7. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang dipergunakan sebagai media pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas penerapan dari berbagai bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas ekonomis, efisiensi, efektif, transaparansi, akuntabel dan auditabel.[10]

B. Sistem Pengendalian Internal

1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut Mulyadi merupakan suatu proses yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dimana hal ini bukan tujuan. Melainkan bentuk kegiatan atau rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam suatu entitas atau kelompok.[11]

Menurut PP No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

---

[9] PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15
[10] Kementrian Dalam Negeri,*Petunjuk Pelaksanaan SIPKD,*(Jakarta,2010)
[11] Mulyadi,Auditing,(Jakarta:Salemba Empat,2002),hal.180

secara kontinyu oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan pada tujuan organisasi agar dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien.[12]

Berdasarkan pendapat dari berbagai pihak, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang melekat dalam suatu organisasi atau individu yang dilakukan secara terus menerus guna mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal secara garis besar terdiri dari 4 komponen, diantaranya :

1) Tujuan Strategis, dengan adanya sasaran-sasaran yang dapat mendukung misi sebuah organisasi
2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
3) Mendorong efisiensi
4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.[13]

3. Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian Internal, terdiri atas lima komponen yang diantaranya sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian diciptakan pimpinan instansi guna untuk penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan merupakan cerminan dari nilai etika dasar.

b. Penilaian resiko

---

[12] PP.Nomor 60 Tahun 2008

[13] Theodorus M.Tuanakotta,*Audit Kontemporer*,(Jakarta:Salemba Empat,2017),hal.94

Penilaian resiko dilakukan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah yang mencakup tujuan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan[14].

c. Kegiatan pengendalian

Dalam menerapkan kegiatan pengendalian diatur dalam pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) Kegiatan inti dari Instansi Pemerintah
(2) Kegiatan harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
(3) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
(4) Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur

d. Informasi dan Komunikasi

Menurut Pasal 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan dengan efektif. Agar terselenggara dengan efektif maka pimpinan isntansi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.[15]

---

[14] Ibid., hal.95-109
[15] PP Nomor 60 Tahun 2008

C. Kejelasan Sasaran Anggaran

1. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

   Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana dalam melihat tujuan anggaran ditetapkan secara lebih khusus dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.[16]

2. Karakteristik dalam menentukan sasaran anggaran

   Menurut Putra, terdapat beberapa karakteristik dalam menentukan sasaran anggaran, antara lain :

   a. Sasaran harus spesifik, jelas dan tidak samar
   b. Sasaran harus memiliki tantangan yang dapat dicapai[17]

3. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran, diantaranya:

   a. Tujuan dan target yang hendak dicapai, membuat tujuan-tujuan secara rinci mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.
   b. Ketersediaan sumber daya, faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah
   c. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan target

---

[16] Siti Ruri Suhaesti, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016), hal.709

[17] Deki Putra,*Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah*,(Padang:Universitas Negeri Padang,2013), hal.6

d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan baru, fluktuasi pasar, perubahan social dan politik, bencana alam dan sebagainya[18]

4. Tahapan-tahapan dalam siklus anggaran

Menurut Mardiasmo, tahapan-tahapan dalam siklus anggaran dalam sektor publik, diantaranya sebagai berikut:

a. Tahap persiapan dan penyusunan anggaran
b. Tahap ratifikasi anggaran
c. Tahap pelaksanaan anggaran
d. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran[19]

D. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan upaya pertanggungjawaban atas suatu kegiatan atau kinerja yang telah dilakukan suatu organisasi. Pelaksanaan Akuntabilitas sangat penting dilakukan bagi sector swasta maupun sektor publik guna mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya

---

[18] Mardiasmo,*Akuntansi Sektor Publik*,(Yogyakarta:CV.ANDI OFFSET,2018), hal.85

[19] Marno Wance, Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan ,(Volume 5 | Nomor 1 | Juni 2019), hal.4-5

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan.[20]

Dalam arti luas, akuntabilitas memberikan pengertian bahwa pejabat tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, namun juga kepada masyarakat, media massa serta lembaga swadaya masyarakat.[21]

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas merupakan upaya mempertanggungjawabkan tujuan, misi,atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal

Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pengelolaan desa ke pemerintah kabupaten.

b. Akuntabilitas horizontal

Bentuk pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih rendah dari yang tinggi. Misalnya pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat luas.[22]

---

[20] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:CV.ANDI OFFSET,2018),hal.27

[21] Rio Pratama,dkk, *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019), hal.433

[22] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta:CV.ANDI OFFSET,2018), hal.27

3. Dimensi Akuntabilitas

Dalam Akuntabilitas sebuah organisasi terdapat beberapa dimensi. Terdapat empat dimensi akuntabilitas dalam sebuah organisasi sektor publik, diantaranya:

a. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran memuat penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum memuat adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses memuat prosedur-prosedur dalam melaksanakan tugas dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses merupakan perwujudan dari pemberian pelayanan yang cepat dan responsif.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program memuat beberapa pertimbangan mengenai tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Serta mempertimbangkan alternatif program dalam mencapai dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan memuat beberapa pertanggungjawaban pemerintah, baik di tingkat pusat atau daerah. [23]

---

[23]Mardiasmo,*Akuntansi Sektor Publik*,..., hal.28-29

4. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil dari kerja atau kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengaplikasikan kemampuan, usaha dan kesempatan dalam melakukan kerja. Seseorang atau individu yang memiliki kinerja tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi.

Penilaian kinerja berguna bagi sebuah organisasi untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya penilaian kinerja.[24]

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 1999, Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan atas kewajiban instansi untuk melaksanakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi,tujuan,sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indicator kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan dengan mempertimbangkan indikator masukan, keluaran, proses, hasil, manfaat, dan dampak.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya instansi pemerintah dalam mewujudkan kewajiban mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan dari misi, sasaran,dan tujuan yang ditetapkan organisasi secara periodik.[25]

---

[24] Nafi,Inayati Zahro, *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus*, (Universitas Muria Kudus)

[25] Dina Afrina,dkk,*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemrintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* ,(Riau:Jom Fekon Vol.2 No.2 Oktober 2015), hal.6

6. Tujuan dan sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan dan sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.[26]

Pemerintah dalam menciptakan akuntabilitas kinerja dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada *stakeholder*nya. Selain itu juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan secara terbuka.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja

a. *Low Literacy Bercentage*

Suatu kelompok yang kurang peduli dengan masalah-masalah social, cenderung memberikan toleransi terhadap adanya nepotisme, sogok menyogok dan korupsi. Setiap individu sibuk memikirkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesusahan yang dialami orang lain, sehingga lupa akan kekurangan pada penyelenggaraan tugas pemerintah yang menyebabkan akuntabilitas menurun.

b. *A Policy of Live and Let Live*

Adanya penurunan akan nilai-nilai moral, manusia akan semakin mudah melakukan pelanggaran. Yang terjadi saat ini adalah mereka saling berlomba-lomba mencari keuntungan dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

---

[26] Inpres Nomor 7 Tahun 1999

c. *Deficiencies in the accounting system*

Buruknya sistem akuntansi, merupakan salah satu faktor penyebab tidak dapat diperolehnya informasi yang tepat, handal dapat dipercaya guna keperluan penerapan akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik. Kelemahan yang menyebabkan tidak terlaksana akuntabilitas yaitu adanya sistem informasi yang tidak mendukung dan tidak dapat diandalkan, sistem pengendalian internal yang tidak memadai serta manajemen yang tidak professional dan kompeten.

d. *Technological obsolescence and insdequate surveillance system*

Tidak tersedianya teknologi yang memadai guna mendukung kelancaran kerja. Hal ini merupakan faktor penghambat bagi terselenggaranya akuntabilitas.

e. *Government monopoly*

Kondisi dimana sumber daya yang ada tersentralisasi di tangan pemerintah dan setiap adanya keputusan menjadi kewajiban pemerintah sendiri. Mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit mengelola, memantau dan mengevaluasinya.

Selain faktor-faktor diatas, MAB-MIAC (*Australia Publication Series*) mengemukakan bahwa terdapat 4 tambahan faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas kinerja :

a. Gagalnya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Sebagai akibat terjadinya kesulitan dalam menyederhanakan pengertian dan komponen

tujuan oragnisasi tersebut yang telah tergambar dalam perencanaan strategis

b. Pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas. Mengakibatkan ketidakjelasan siapa yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada siapa

c. Laporan yang telah diterbitkan oleh sebuah instansi tidak seperti laporan yang terdapat dalam sebuah perusahaan yang mana hanya tertuju pada perolehan laba. Oleh karena itu, instansi pemerintah tidak terdapat hubungan langsung antara tujuan program dengan kebijakan yang dibuat.

d. Indikator atas keberhasilan atau kegagalan sektor publik yang tidak jelas.[27]

E. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Afrina yang berasal dari Universitas Riau bertujuan untuk mengetahui secara empiris adanya Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan metode kuantitatif ini menyimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa memiliki pengaruh terhadap variable Y. Persamaan dalam

[27] Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(Jakarta:Penerbit Lembaga Administrasi Negara,2000),hal30-34

penelitian ini terdapat pada metode pengambilan data. Perbedaan dalam penelitian saya terdapat lokasi penelitian[28]

b. Hasil Penelitian Primayoni dan Adiputra yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan efektivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada dinas-dinas di kabupaten klungkung. Penelitian Ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenrintah Kabupaten Klungkung. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang diambil yaitu *Purposive Sampling* dan juga pada teknik pengambilan data. Perbedaan penelitian Primayoni terdapat pada lokasi penelitian yang bertepat Kabupaten Klungkung dan juga data series yang diambil [29]

c. Hasil Penelitian Fitrawati, Kahar dan Ikbal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja pada Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian ini mengggunakan survey. Hasil Penelitian yang dilakukan Fitrawati, Kahar dan Ikbal mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjarwati, Karyanti, Kaltsum dan

---

[28]Dina Afrina,dkk. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah* ,(Riau:Jom Fekon Vol.2 No.2 Oktober,2015)

[29] Ni Kadek Primayoni,dkk, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014)

Rohman yang mana menunjukkan adanya sasaran anggaran yang jelas guna mempermudah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Persamaan penelitian ini terdapat pada Jenis penelitian menggunakan survey. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten Parigi Moutong[30]

d. Hasil Penelitian yang dilakukan Lumenta, Morasa, dan Mawikere yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode dalam penelitian ini menggunakan data primer, dengan jenis penelitian eksplanasi asosiatif. Hasil penelitian ini diketahui Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Minahasa Selatan, Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Minahasa Selatan. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan menggunakan eksplanasi asosiatif. Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan sampel yang mana populasi dalam penelitian ini seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan[31]

---

[30] Fitrawati,dkk, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017)

[31] Agnestasia Laura Lumenta dkk, Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016)

e. Hasil Penelitian Anjarwati yang bertujuan untuk mengetahui bukti empiris secara parsial dan simultan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabiltas kinerja instansi pemerintah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Persamaan penelitian ini terdapat pada teknik pengumpulan data. Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu SKPD di wilayah Tegal dan Pemalang.[32]

f. Hasil Penelitian Kalsum, dan Rohman yang bertujuan mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. Metode dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria pejabat tertentu. Hasil penelitian ini Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan variable intervening. Persamaan penelitian ini terdapat Teknik pengumpulan

[32] Mei Anjarwati, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(Accounting Analysis Journal,2012)

data. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variable yang memiliki variable intervening[33]

g. Hasil penelitian Astuti yang bertujuan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kota bandung. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil pada penelitian ini Sistem Pengendalian intenal dan Kualitas Laporan Keuangan memiliki hubungan erat dan berpengarub terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Persamaan penelitian ini terdapat Teknik pengumpulan data. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling*[34]

h. Hasil penelitian Paramitha yang bertujuan untuk menguji pengaruh ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Persamaan dengan penelitian saya terdapat di Variabel Y

---

[33] Ummu Kaltsum, Abdul Rohman, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening,(DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING,2013)

[34] Yulia Astuti, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(Progran Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2016)

akuntabilitas kinerja dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya terdapat di salah satu variabel X yaitu sistem pelaporan.[35]

i. Hasil penelitian Pratama, yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Persamaan dalam penelitian saya terdapat di Variabel Y yang digunakan yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian saya terdapat pada lokasi penelitian dan jumlah data series yang digunakan.[36]

j. Hasil penelitian Aprilianti, yang bertujuan untuk menguji pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif analisis regresi linier berganda, untuk pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian ini dapat

---

[35] Ida Ayu Made Dwiki Paramitha, Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja,(E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016)

[36] Rio Pratama,dkk, Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri D, Februari 2019)

diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan 2 variabel lainnya Sistem pelaporan dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Persamaan dengan penelitian saya terdapat di metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya terdapat di pengambilan sampel, pada penelitian ini menggunakan rumus slovin sedangkan penelitian saya menggunakan rumus sugiyono.[37]

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsep berpikir ini disajikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dari tujuan penelitiannya yang diangkat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

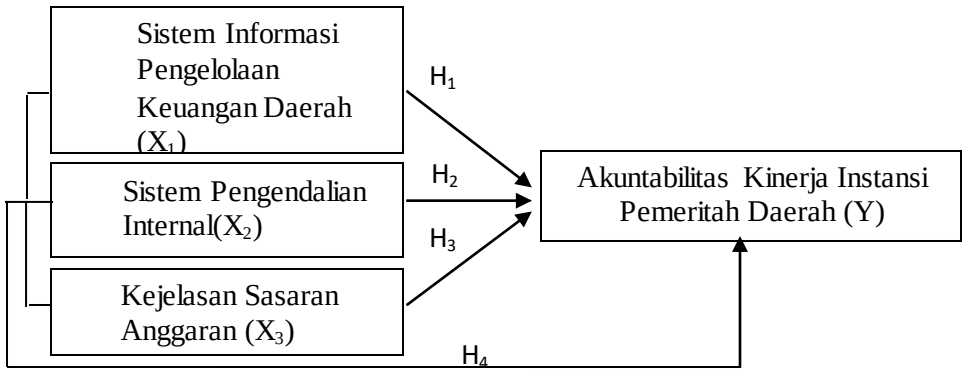

Sumber: Gambar diolah peneliti, 2021

[37] Dewi Aprilianti, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan,(Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 9, No. 2, Juli 2020)

Kerangka konseptual berfungsi untuk memudahkan peneliti untuk memperjelas dan menekankan pada akar pemikiran yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hubungan-hubungan antar variabel di atas dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan variabel Y, dan variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel X1, Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel X2, dan Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai variabel (X3). Dalam penelitian ini variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran akan diuji kebenarannya apakah terdapat pengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual, maka kita dapat mengtahui hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang diajukan antara lain:

a. H1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
b. H2: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

c. H3: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

d. H4: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung